

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan suatu negara bergantung pada usaha yang tumbuh didalamnya. Pergerakan perekonomian yang maju dan terus berkembang akan membantu negara untuk tumbuh lebih cepat dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Untuk membantu perkembangan perekonomian, banyak dikembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia yang melibatkan masyarakat sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang lebih luas dan berkurangnya pengangguran. Berdasarkan data pada laman resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2020), bahwa hingga tahun 2018 terdapat lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia.

Kecerdasan finansial mutlak diperlukan agar seseorang dapat terus menikmati kesejahteraan, seperti yang dikemukakan oleh Akmal dan Saputra (2016). Kecerdasan finansial bagi pelaku usaha UMKM sangat diperlukan mengingat UMKM merupakan penunjang perkembangan perekonomian negara. Byrne (2007) menyatakan bahwa rendahnya pengetahuan keuangan akan menyebabkan terjadi kesalahan dalam perencanaan keuangan dan timbul bias dalam pencapaian kesejahteraan ketika usia sudah tidak produktif. Literasi finansial adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pengetahuan finansial. Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan

dan keyakinan yang akan mempengaruhi sikap serta perilaku dalam meningkatkan kualitas penentuan keputusan dan manajemen keuangan untuk mencapai kesejahteraan (SNLKI Revisit, 2017). Remund (2010) menyatakan empat hal umum dalam literasi keuangan yaitu penganggaran, tabungan, pinjaman dan investasi. Empat hal tersebut seharusnya dikuasai oleh setiap orang untuk mengelola keuangannya dengan baik, khususnya bagi pelaku UMKM agar mampu memaksimalkan penggunaan dana dalam usahanya. Bercermin pada hal tersebut, maka literasi keuangan sangat dibutuhkan agar masyarakat yang bergerak pada sektor UMKM mampu mengelola keuangan usaha dengan baik (Desiyanti, 2016).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 melakukan survey di 34 provinsi di Indonesia dan hasil dari survey tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang baik hanya 38,03%. Dibandingkan pada tahun 2016, tingkat literasi keuangan di Indonesia meningkat dari 29,7%. Khususnya pada sektor UMKM, tingkat literasi keuangannya hanya mencapai 15,68% berdasarkan survey OJK pada tahun 2013. Sejalan dengan pernyataan Hasyim (2013) bahwa salah satu faktor kendala yang menyebabkan terkendalannya pengembangan UMKM adalah informasi keuangan. Disebutkan dalam penelitian tersebut bahwa sebanyak 77,5% UMKM tidak memiliki laporan keuangan. Kondisi ini jelas akan membuat masyarakat Indonesia yang bekerja pada sektor UMKM sulit mengatur keuangannya pribadi maupun usahanya.

Berdasarkan hasil survey OJK tahun 2019, Provinsi Bali menempati urutan ketiga secara nasional dengan persentase literasi keuangan sebesar 92,91%. Hal ini meunjukkan bahwa Provinsi Bali memiliki literasi keuangan yang baik

dibandingkan dengan sebagian besar provinsi di Indonesia. Meski demikian, di Kabupaten Buleleng persentase literasi keuangannya hanya 32,4%.

Di Kabupaten Buleleng, terdapat 34.552 UMKM yang telah terbentuk hingga akhir tahun 2018 menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali. Salah satu sektor UMKM yang ada di Buleleng adalah sektor pengolahan ikan yang terletak di daerah pesisir pantai. Panjang pesisir pantai yang mencapai 157,05km dengan hasil laut yang melimpah mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat khususnya yang bermukim disekitar pesisir pantai Buleleng. Berdasarkan data Poklhasr Kabupaten Buleleng tahun 2014, UMKM sektor pengolahan ikan ini disebut Kelompok Pengolah dan Pemasar atau Poklhasr Perikanan dan Kelautan. Terdapat 72 Poklhasr Perikanan dan Kelautan yang tersebar di tujuh kecamatan/desa di Kabupaten Buleleng.

Desa Pengastulan merupakan salah satu desa yang memiliki Poklhasr Perikanan dan Kelautan dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Terdapat 5 Poklhasr Perikanan dan Kelautan yang tergabung atas 80 ibu rumah tangga Desa Pengastulan. Poklhasr Perikanan dan Kelautan Pala Sari dibentuk pada tahun 2001 yang diketuai oleh Putu Adi merupakan Poklhasr pertama di Desa Pengastulan. Poklhasr ini memiliki produk olahan ikan segar, ikan pindang, dan ikan asap dan memasarkan olahanya ke pasar di daerah Kecamatan Seririt dan Kecamatan Busungbiu. Hingga saat ini, Poklhasr Pala Sari tetap beroperasi mengolah dan memasarkan ikan segar, ikan pindang dan ikan asap. Pada tahun yang sama, terbentuk Poklhasr Perikanan dan Kelautan baru yang bernama Poklhasr Sari Mekar I dengan produk dan pasar yang sama dengan Poklhasr Pala Sari. Selanjutnya pada tahun 2003 terbentuk Poklhasr Sari Mekar II, juga

Poklhasar Segara Mulia dan Poklhasar Segara Amertha pada tahun 2012. Kelima Poklhasar di Desa Pengastulan ini tergabung dalam Kelompok Pemindangan Desa Pengastulan yang diketuai oleh Putu Adi.

Kelompok Pemindangan Desa Pengastulan memiliki satu gedung sekretariat yang terletak di Banjar Pala Desa Pengastulan. Sekretariat yang merupakan bentuk bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng ini digunakan sebagai sarana berkumpul dalam pelaksanaan operasionalnya seperti rapat dan arisan anggota dan juga untuk menyimpan data terkait Kelompok Pemindangan Desa Pengastulan. Pada awalnya gedung sekretariat ini juga memiliki tempat untuk pengolahan hasil laut bagi kelima Poklhasar di Desa Pengastulan, namun dikarenakan kendala sulitnya pasokan air bersih maka kegiatan pengolahan ikan dilakukan di rumah masing-masing anggota. Kegiatan pengolahan dan pemasaran ikan yang dilaksanakan oleh anggota Kelompok Pemindangan Desa Pengastulan dilakukan secara perorangan di rumah masing-masing anggota. Rata-rata dalam satu hari setiap anggota Kelompok Pemindangan Desa Pengastulan mampu mengolah hingga 32 kilogram ikan untuk kemudian dipasarkan setelah diolah menjadi ikan pindang, ikan asap, maupun dijual dalam kondisi segar.

Sumber dana Kelompok Pemindangan Desa Pengastulan tidak hanya berasal dari hasil penjualan olahan ikan, namun juga dari bantuan pemerintah Kabupaten Buleleng. Bantuan berupa dana ini kemudian digunakan untuk membeli peralatan penunjang operasional bagi masing-masing anggota. Pembagaian bantuan ini dilakukan secara merata kepada seluruh anggota sehingga mereka memiliki sarana penunjang operasional yang memadai untuk mengolah ikan. Dari hasil

pengolahan ikan tersebut, masing-masing anggota melakukan penjualan secara mandiri dan hasil penjualan mereka dikelola oleh masing-masing individu. Penghasilan setiap anggota kelompok dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi dan membayar beberapa iuran yang telah menjadi kesepakatan dalam kelompok. Hasil penjualan setiap individu memiliki jumlah yang berbeda setiap harinya dan tidak dilakukan pencatatan keuangan oleh masing-masing individu. Sebagian besar anggota hanya mengenyam pendidikan sampai pada tingkat sekolah dasar, sehingga pemahaman tentang pengelolaan dan pencatatan keuangan yang baik belum dikuasai. Pencatatan keuangan secara umum hanya dilakukan didalam kelompok dan dilakukan secara sederhana oleh bendahara kelompok agar dimengerti oleh seluruh anggotanya.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Tingkat Literasi Keuangan Anggota Kelompok Pemindangan Desa Pengastulan**”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut.

1. Rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Buleleng.
2. Jumlah UMKM yang banyak tidak diimbangi dengan tingkat literasi yang baik sehingga menghambat pelaku UMKM untuk mengelola keuangan dengan baik.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka disimpulkan bahwa permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah tingkat literasi keuangan anggota Kelompok Pemindangan Desa Pengastulan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

- 1 Bagaimana sistem pencatatan keuangan anggota Kelompok Pemindangan Desa Pengastulan?
- 2 Bagaimana tingkat literasi keuangan anggota Kelompok Pemindangan Desa Pengastulan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian untuk mengetahui hal sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sistem pencatatan keuangan anggota Kelompok Pemindangan Desa Pengastulan.
2. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan anggota Kelompok Pemindangan Desa Pengastulan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia khususnya pada pelaku UMKM dan pengembangan ilmu-ilmu keuangan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan serta memadukan teori yang didapat dengan fenomena di lapangan.

b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang membangun untuk meningkatkan kualitas lembaga, termasuk seluruh pendidik yang ada didalamnya. Selain itu juga dapat menambah sumber bacaan ilmiah dan digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

